

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dilaksanakan dengan bentuk yaitu kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah, melakukan kegiatan operasi pasar murah, dan pemantauan harga dan kebijakan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting oleh Pemerintah Daerah Kota Padang yaitu kendala dalam kegiatan operasi pasar murah adalah kurangnya informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan operasi pasar murah, kurangnya fasilitas berupa tenda yang tidak memadai untuk stand bagi pelaku usaha, kurangnya komitmen pelaku usaha untuk menghadiri kegiatan operasi pasar, harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tidak stabil karena adanya kebiasaan masyarakat yang membeli barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan jumlah relatif banyak untuk memenuhi stok serta perubahan cuaca yang berakibat pada gagal panen oleh petani, bencana alam dan sebagainya yang mempengaruhi pelaksanaan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

3. Upaya yang dilakukan dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, yaitu meningkatkan komunikasi dalam memberikan informasi terkait operasi pasar murah kepada masyarakat, salah satunya dengan menggunakan media sosial seperti facebook, dan instagram, bekerjasama dengan pihak lainnya dalam penyediaan tenda untuk stand penjualan, menghiimbau dan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian barang kebutuhan pokok dan barang penting secara berlebihan untuk memenuhi stok khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan, dan sebagainya.

## **B. Saran**

1. Agar Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan Kota Padang lebih aktif lagi memberikan informasi terkait operasi pasar murah dengan memanfaatkan media sosial resmi [disdag.padang.go.id](http://disdag.padang.go.id) milik Pemerintah Daerah Kota Padang dan juga menyebarkan informasi dengan menggunakan mobil informasi berjalan milik Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Padang.
2. Agar Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan lebih aktif lagi dalam memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian barang kebutuhan pokok dan barang penting secara berlebihan agar harga menjadi stabil.
3. Agar Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan melakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan pelatihan dalam menanam bibit tanaman seperti cabai yang dapat ditanam oleh

masyarakat di halaman rumah untuk mengantisipasi kenaikan harga yang disebabkan petani gagal panen, dan faktor-faktor lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Pamulang.
- Budi Setiyono, 2018, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Undip Press, Semarang.
- Fandy Tjiptono, 2015, *Strategi Pemasaran*, Penerbit Andi, Edisi Keempat, Yogyakarta.
- Ibnu Sam Widodo, dkk, 2023, *Hukum Tata Negara*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Prenadamedia Grup, Edisi Pertama, Depok
- Kotler, Philip dan Gary Armstrong, 2001, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Sondang P. Siagian, 2003, *Filsafat Administrasi*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Edisi Revisi, Jakarta.
- William, J.Stanton, 1993, *Prinsip Pemasaran*, Erlangga, Edisi Ketujuh, Jakar
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan.

### C. Sumber Lain

Abdul Malik, 2020, Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda, *Jurnal Administrasi Bisnis*

Dormina Takaendengan, 2018, Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*.

Iswandir, 2021, Dasar-dasar proses pengawasan berorganisasi, *Jurnal Universitas Suryadarma*, Vol.1 No.1.

Joko Nugroho, 2023, Pemkot Padang Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadhan, Antara, 6 Maret 2023, <https://sumbar.antaranews.com/berita/557364/pemkot-padang-antisipasi-kenaikan-harga-bahan-pokok-jelang-ramadhan>

Oly Fia Sela, 2021, Pengawasan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif ekonomi Islam, Program Sarjana institut Agama Islam Negri Ponorogo.

Muhammad Mirza Arif Zaenal, 2020, Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Menjelang Lebaran, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.

Lida Puspaningtyas, 2023, *Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok di Padang Mulai Naik*, Republika, 23 Maret, 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrz5gn502/harga-sejumlah-kebutuhan-pokok-di-padang-mulai-naik>.

Said Muhammad Rizal, 2019, Pengaruh Motivasi, Pengawasan, Dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol 2 No.1.

Salmon Bihuku, 2018, “Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. VI/No. 1

Sapuan Gafar, 2018, Quo Vadis Manajemen Kebutuhan Pokok, *Jurnal Pangan*, Vol.17, No 2.

Susi Tri Lestari, 2022, Analisis Peran Dinas Koperasi dan Perdagangan dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2022.

Yati Nuryati dan Miftah Farid, 2016, Analisis Penetapan Kebijakan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian, hm 193-199

Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, 2018, “Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (Opm) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan DIY)” UII